



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
HASIL EVALUASI JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/251/M.SM.04.00/2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1550/ M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/573/ SM.04.00/2021 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

## BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

### Pasal 2

- (1) Kelas dan nilai jabatan disusun melalui proses evaluasi jabatan.
- (2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Kriteria penilaian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan meliputi:
  - a. ruang lingkup dan dampak program;
  - b. pengaturan organisasi;
  - c. wewenang penyelia dan manajerial;
  - d. hubungan personal yang harus dilakukan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (4) Kriteria penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:
  - a. pengetahuan dan keahlian;
  - b. pengawasan penyelia;
  - c. pedoman/panduan kerja;
  - d. kompleksitas pekerjaan;
  - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
  - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
  - g. tujuan hubungan;
  - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
  - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan evaluasi jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelas jabatan dan nilai jabatan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berupa:

- a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan pengawas; dan
- b. nilai dan kelas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### Pasal 4

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai dan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PERUBAHAN KELAS JABATAN

### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan ASN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
  - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
  - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan Informasi Faktor Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32);
2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Januari 2022  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.  
NIP. 19710602200604 1 005



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BELITUNG TIMUR

HASIL EVALUASI JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Sekretaris Daerah	15	3.555
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3.030
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3.030
5.	Sekretaris DPRD	14	2.865
6.	Inspektur	14	3.030
7.	Kepala Dinas Pendidikan	14	2.865
8.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2.865
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2.865
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	2.865
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2.865
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2.865
13.	Kepala Dinas Perikanan	14	2.865
14.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2.865
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	2.865
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2.865
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	14	2.865
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	14	2.865
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2.865
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2.865
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	2.865
22.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	2.865
23.	Kepala Dinas Perpustakaan	14	2.865
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2.865
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	3.030
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	3.030
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2.865
28.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2.715
29.	Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	13	2.715
30.	Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	13	2.715
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	2.465
32.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	12	2.315
33.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2.315

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
34.	Kepala Bagian Hukum	12	2.315
35.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	12	2.315
36.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2.315
37.	Kepala Bagian Organisasi	12	2.315
38.	Kepala Bagian Umum	12	2.315
39.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2.315
40.	Sekretaris Inspektorat	12	2.140
41.	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	2.115
42.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2.115
43.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2.115
44.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	2.115
45.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	2.115
46.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2.115
47.	Sekretaris Dinas Perikanan	12	2.115
48.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2.115
49.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	2.115
50.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2.115
51.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	12	2.115
52.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	12	2.115
53.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2.115
54.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2.115
55.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	2.115
56.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	2.115
57.	Sekretaris Dinas Perpustakaan	12	2.115
58.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2.115
59.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	2.140
60.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	2.140
61.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2.115
62.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2.315
63.	Camat	12	2.315
64.	Direktur RSUD	12	2.315
65.	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	11	2.090
66.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	2.090
67.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2.090
68.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090
69.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1.990
70.	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1.990
71.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1.990
72.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	11	2.045

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
73.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	2.045
74.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	2.045
75.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	2.045
76.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2.045
77.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2.045
78.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	2.045
79.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.045
80.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	2.045
81.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	2.045
82.	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	11	2.045
83.	Kepala Bidang Penunjang	11	2.045
84.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2.045
85.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2.045
86.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2.045
87.	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	2.045
88.	Kepala Bidang Penataan Perumahan	11	2.045
89.	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman	11	2.045
90.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga	11	2.045
91.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	2.045
92.	Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	11	2.045
93.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	11	2.045
94.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2.045
95.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	2.045
96.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	11	2.045
97.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	11	2.045
98.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	11	2.045
99.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	11	2.045
100.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	11	2.045
101.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	11	2.045
102.	Kepala Bidang Pelayaran	11	2.045
103.	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	11	2.045
104.	Kepala Bidang Pembudidayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	11	2.045
105.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	11	2.045
106.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2.045
107.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	11	2.045
108.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	11	2.045
109.	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	11	2.045
110.	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	11	2.045



No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
111.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	11	2.045
112.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2.045
113.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.045
114.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2.045
115.	Kepala Bidang Perkebunan	11	2.045
116.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	2.045
117.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2.045
118.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	11	2.045
119.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	11	2.045
120.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.045
121.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.045
122.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.045
123.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	2.045
124.	Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	11	2.045
125.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	11	2.045
126.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	11	2.045
127.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	2.045
128.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	2.045
129.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	2.045
130.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	11	2.045
131.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	11	2.045
132.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2.045
133.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2.090
134.	Kepala Bidang Kearsipan	11	2.045
135.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	2.045
136.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	2.045
137.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2.045
138.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2.045
139.	Kepala Bidang Anggaran	11	2.045
140.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	11	2.045
141.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	11	2.045
142.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2.045
143.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	11	2.045
144.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	11	2.045
145.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur	11	2.045
146.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	11	2.045
147.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	11	2.045
148.	Sekretaris Camat	11	2.090
149.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	9	1.430
150.	Kepala Subbagian Fasilitasi dan Kerja Sama	9	1.430
151.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Administrasi Kewilayahan	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
152.	Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual	9	1.430
153.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial	9	1.430
154.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat	9	1.430
155.	Kepala Subbagian Perundang-Undangan	9	1.430
156.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum	9	1.430
157.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1.430
158.	Kepala Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Serta Sumber Daya Alam	9	1.430
159.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9	1.430
160.	Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan	9	1.430
161.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang/Jasa	9	1.430
162.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	9	1.430
163.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9	1.430
164.	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	1.430
165.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9	1.430
166.	Kepala Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9	1.430
167.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	1.430
168.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	1.430
169.	Kepala Subbagian Protokol	9	1.430
170.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	9	1.430
171.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.430
172.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1.430
173.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
174.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
175.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1.430
176.	Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan	9	1.430
177.	Kepala Subbagian Persidangan, Hubungan Masyarakat dan Protokol	9	1.430
178.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1.430
179.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1.430
180.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9	1.430
181.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	9	1.430
182.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1.430
183.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	9	1.430
184.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	9	1.430
185.	Kepala Seksi Program, Data dan Prasarana	9	1.430
186.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1.430
187.	Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu	9	1.430
188.	Kepala Seksi Kurikulum	9	1.430
189.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	9	1.430
190.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
191.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.430
192.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1.430
193.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1.430
194.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Lingkungan Kerja dan Olahraga	9	1.430
195.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1.430
196.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1.430
197.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9	1.430
198.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	1.430
199.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9	1.430
200.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	1.430
201.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	9	1.430
202.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana	9	1.430
203.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	1.430
204.	Kepala Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana	9	1.430
205.	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana	9	1.430
206.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9	1.430
207.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	9	1.430
208.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	9	1.430
209.	Kepala Seksi Penunjang Medik	9	1.430
210.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	9	1.430
211.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1.430
212.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	1.430
213.	Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium	9	1.430
214.	Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan Air	9	1.430
215.	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Sumber Air	9	1.430
216.	Kepala Seksi Penataan Bangunan	9	1.430
217.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9	1.430
218.	Kepala Seksi Penataan Drainase	9	1.430
219.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	1.430
220.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	9	1.430
221.	Kepala Seksi Pertanahan	9	1.430
222.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan	9	1.430
223.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan	9	1.430
224.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	9	1.430
225.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9	1.430
226.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	9	1.430
227.	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam	9	1.430
228.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
229.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	9	1.430
230.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	9	1.430
231.	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	9	1.430
232.	Kepala Seksi Penataan Desa	9	1.430
233.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	9	1.430
234.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	9	1.430
235.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan	9	1.430
236.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	9	1.430
237.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	9	1.430
238.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender	9	1.430
239.	Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	9	1.430
240.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	9	1.430
241.	Kepala Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	9	1.430
242.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	9	1.430
243.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	9	1.430
244.	Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9	1.430
245.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan	9	1.430
246.	Kepala Seksi Disverifikasi dan Promosi Produk Perikanan	9	1.430
247.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	9	1.430
248.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	9	1.430
249.	Kepala UPT Balai Perikanan Budidaya	9	1.430
250.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	1.430
251.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	9	1.430
252.	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	9	1.430
253.	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal	9	1.430
254.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	9	1.430
255.	Kepala Seksi Kepelabuhanan	9	1.430
256.	Kepala Seksi Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga dan Prestasi	9	1.430
257.	Kepala Seksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	9	1.430
258.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Industri Olahraga	9	1.430
259.	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	9	1.430
260.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	9	1.430
261.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9	1.430
262.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan	9	1.430
263.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	9	1.430
264.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	9	1.430
265.	Kepala Seksi Layanan e-Government	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
266.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	9	1.430
267.	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Data	9	1.430
268.	Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Investasi	9	1.430
269.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	9	1.430
270.	Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan	9	1.430
271.	Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi	9	1.430
272.	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran	9	1.430
273.	Kepala Seksi Perizinan Dasar dan Non Perizinan	9	1.430
274.	Kepala Seksi Perizinan Usaha	9	1.430
275.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan	9	1.430
276.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	9	1.430
277.	Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen	9	1.430
278.	Kepala Seksi Industri Pangan, Sandang dan Aneka	9	1.430
279.	Kepala Seksi Industri Kerajinan, Logam dan Kimia	9	1.430
280.	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri	9	1.430
281.	Kepala UPT Pengelola Pasar	9	1.430
282.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430
283.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430
284.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1.430
285.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	9	1.430
286.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan	9	1.430
287.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	9	1.430
288.	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi	9	1.430
289.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1.430
290.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9	1.430
291.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	9	1.430
292.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	9	1.430
293.	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	1.430
294.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	9	1.430
295.	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian	9	1.430
296.	Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman	9	1.430
297.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	1.430
298.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	9	1.430
299.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	9	1.430
300.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	9	1.430
301.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	9	1.430
302.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1.430
303.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	9	1.430

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
304.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	9	1.430
305.	Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan	9	1.430
306.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	1.430
307.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	9	1.430
308.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	9	1.430
309.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	9	1430
310.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	9	1.430
311.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	9	1.430
312.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	9	1.430
313.	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	9	1.430
314.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan	9	1.430
315.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	1.430
316.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1.430
317.	Kepala Seksi Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1.430
318.	Kepala Seksi Destinasi Wisata	9	1.430
319.	Kepala Seksi Industri Pariwisata	9	1.430
320.	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	9	1.430
321.	Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata	9	1.430
322.	Kepala Seksi Kesenian	9	1.430
323.	Kepala Seksi Warisan dan Tradisi	9	1.430
324.	Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Permuseuman	9	1.430
325.	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9	1.430
326.	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1.430
327.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	9	1.430
328.	Kepala Seksi Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	9	1.430
329.	Kepala Sekretariat Pelaksana	9	1.430
330.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1.430
331.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1.430
332.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan	9	1.430
333.	Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	9	1.430
334.	Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	9	1.430
335.	Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	9	1.430
336.	Kepala Subbidang Pemerintahan	9	1.430
337.	Kepala Subbidang Pembangunan Manusia	9	1.430
338.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9	1.430
339.	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9	1.430
340.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	9	1.430
341.	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran	9	1.430



No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
342.	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak	9	1.430
343.	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak	9	1.430
344.	Kepala Subbidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelaporan	9	1.430
345.	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung	9	1.430
346.	Kepala Subbidang Belanja Langsung	9	1.430
347.	Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan	9	1.430
348.	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan	9	1.430
349.	Kepala Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	9	1.430
350.	Kepala Subbidang Inventarisasi dan Penilaian	9	1.430
351.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan	9	1.430
352.	Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian	9	1.430
353.	Kepala Subbidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara	9	1.430
354.	Kepala Subbidang Mutasi dan Kepangkatan	9	1.430
355.	Kepala Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur	9	1.430
356.	Kepala Subbidang Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional	9	1.430
357.	Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	9	1.430
358.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	9	1.430
359.	Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan	9	1.430
360.	Kepala Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat	9	1.430
361.	Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	9	1.430
362.	Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	9	1.430
363.	Kepala Subbidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	9	1.430
364.	Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran	8	1.295
365.	Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan	8	1.295
366.	Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas	8	1.295
367.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	1.295
368.	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	8	1.295
369.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Minum	8	1.295
370.	Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan	8	1.295
371.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Perikanan Budidaya	8	1.295
372.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	8	1.295
373.	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khusus	8	1.295
374.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	8	1.295
375.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8	1.295
376.	Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1.295
377.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	8	1.295
378.	Kepala Subbidang Ekstensifikasi Pajak	8	1.295

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
379.	Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan	8	1.295
380.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.320
381.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	1.320
382.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1.320
383.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.320
384.	Kepala Seksi Pelayanan	8	1.320

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.  
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Administrator Database Pertama	8	1.280
2.	Administrator Kesehatan Madya	11	1.930
3.	Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
4.	Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
5.	Analisis Kebijakan Madya	12	2.135
6.	Analisis Kebijakan Muda	10	1.735
7.	Analisis Kebijakan Pertama	8	1.280
8.	Analisis Kepegawaian Madya	11	1.930
9.	Analisis Kepegawaian Muda	9	1.355
10.	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280
11.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	1.230
12.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.005
13.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	740
14.	Analisis Ketahanan Pangan Madya	11	1.930
15.	Analisis Ketahanan Pangan Muda	10	1.735
16.	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	8	1.280
17.	Apoteker Utama	13	2.485
18.	Apoteker Madya	11	1.945
19.	Apoteker Muda	9	1.370
20.	Apoteker Pertama	8	1.295
21.	Arsiparis Madya	11	1.930
22.	Arsiparis Muda	9	1.355
23.	Arsiparis Pertama	8	1.280
24.	Arsiparis Penyelia	8	1.230
25.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
26.	Arsiparis Pelaksana	6	740
27.	Asisten Apoteker Penyelia	8	1.245
28.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
29.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
30.	Asisten Apoteker Pemula	5	505
31.	Assessor SDM Aparatur Madya	12	2.135
32.	Assessor SDM Aparatur Muda	10	1.735
33.	Assessor SDM Aparatur Pertama	8	1.280
34.	Auditor Kepegawaian Madya	11	1.995
35.	Auditor Kepegawaian Muda	9	1.355
36.	Auditor Kepegawaian Pertama	8	1.280
37.	Auditor Madya	11	1.930
38.	Auditor Muda	9	1.355
39.	Auditor Pertama	8	1.280
40.	Auditor Penyelia	8	1.230
41.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.005

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
42.	Auditor Pelaksana	6	740
43.	Bidan Madya	11	1.930
44.	Bidan Muda	9	1.355
45.	Bidan Pertama	8	1.280
46.	Bidan Penyelia	8	1.230
47.	Bidan Mahir	7	1.005
48.	Bidan Terampil	6	740
49.	Bidan Pemula	5	540
50.	Dokter Gigi Utama	14	2.805
51.	Dokter Gigi Madya	12	2.225
52.	Dokter Gigi Muda	10	1.670
53.	Dokter Gigi Pertama	9	1.370
54.	Dokter Utama (Khusus <i>Specialist</i> )	15	3.335
55.	Dokter Utama	14	2.805
56.	Dokter Madya (Spesialis)	13	2.430
57.	Dokter Madya	12	2.295
58.	Dokter Muda (Spesialis)	11	1.950
59.	Dokter Muda	10	1.670
60.	Dokter Pertama	9	1.370
61.	Fisioterapis Madya	11	1.930
62.	Fisioterapis Muda	9	1.555
63.	Fisioterapis Pertama	8	1.280
64.	Fisioterapis Penyelia	8	1.230
65.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
66.	Fisioterapis Pelaksana	6	740
67.	Guru Madya	11	1.960
68.	Guru Muda	9	1.385
69.	Guru Pertama	8	1.280
70.	Instruktur Madya	11	1.930
71.	Instruktur Muda	9	1.355
72.	Instruktur Pertama	8	1.280
73.	Instruktur Penyelia	8	1.230
74.	Instruktur Mahir	7	1.005
75.	Instruktur Terampil	6	740
76.	Mediator Hubungan Industrial Madya	11	1.930
77.	Mediator Hubungan Industrial Muda	9	1.355
78.	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	1.280
79.	Medik Veteriner Utama	13	2.485
80.	Medik Veteriner Madya	11	1.930
81.	Medik Veteriner Muda	9	1.355
82.	Medik Veteriner Pertama	8	1.280
83.	Nutrisisionis Madya	11	1.930
84.	Nutrisisionis Muda	9	1.555
85.	Nutrisisionis Pertama	8	1.280
86.	Nutrisisionis Penyelia	8	1.230
87.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
88.	Nutrisisionis Pelaksana	6	740
89.	Okupasi Terapis Penyelia	8	1.230
90.	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
91.	Okupasi Terapis Pelaksana	6	740

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
92.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Penyelia	8	1.230
93.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir	7	1.005
94.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	6	740
95.	Pamong Belajar Madya	11	1.930
96.	Pamong Belajar Muda	9	1.355
97.	Pamong Belajar Pertama	8	1.280
98.	Pamong Budaya Madya	11	1.930
99.	Pamong Budaya Muda	9	1.355
100.	Pamong Budaya Pertama	8	1.280
101.	Pamong Budaya Penyelia	8	1.230
102.	Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan	7	1.005
103.	Pamong Budaya Pelaksana	6	740
104.	Paramedik Veteriner Penyelia	8	1.230
105.	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	1.005
106.	Paramedik Veteriner Pelaksana	6	740
107.	Paramedik Veteriner Pemula	5	540
108.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda	9	1.355
109.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pertama	8	1.280
110.	Penata Anestesi Madya	11	1.930
111.	Penata Anestesi Muda	9	1.355
112.	Penata Anestesi Pertama	8	1.280
113.	Penata Ruang Madya	11	1.930
114.	Penata Ruang Muda	9	1.355
115.	Penata Ruang Pertama	8	1.280
116.	Peneliti Madya	11	1.930
117.	Peneliti Muda	9	1.355
118.	Peneliti Pertama	8	1.280
119.	Penera Madya	11	1.930
120.	Penera Muda	9	1.555
121.	Penera Pertama	8	1.280
122.	Penera Penyelia	8	1.230
123.	Penera Mahir	7	1.005
124.	Penera Terampil	6	740
125.	Pengantar Kerja Madya	11	1.930
126.	Pengantar Kerja Muda	9	1.355
127.	Pengantar Kerja Pertama	8	1.280
128.	Pengantar Kerja Penyelia	8	1.230
129.	Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan	7	1.005
130.	Pengantar Kerja Pelaksana	6	740
131.	Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	1.280
132.	Pengawas Bibit Ternak Madya	11	1.930
133.	Pengawas Bibit Ternak Muda	9	1.355
134.	Pengawas Bibit Ternak Pertama	8	1.280
135.	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8	1.230
136.	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	7	1.005
137.	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	6	740
138.	Pengawas Kemetrologian Madya	11	1.930

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
139.	Pengawas Kemetrolagian Muda	9	1.355
140.	Pengawas Kemetrolagian Pertama	8	1.280
141.	Pengawas Lingkungan Hidup Madya	11	1.930
142.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	9	1.355
143.	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	1.280
144.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	11	1.930
145.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	1.355
146.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	1.280
147.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	1.230
148.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.005
149.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	740
150.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pemula	5	490
151.	Pengawas Mutu Pakan Madya	11	1.930
152.	Pengawas Mutu Pakan Muda	9	1.355
153.	Pengawas Mutu Pakan Pertama	8	1.280
154.	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	8	1.230
155.	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
156.	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	6	740
157.	Pengawas Mutu Pakan Pemula	5	490
158.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	1.930
159.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	1.355
160.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.280
161.	Pengawas Perikanan Pertama	8	1.280
162.	Pengawas Perikanan Pelaksana	6	740
163.	Pengawas Sekolah Utama	13	2.585
164.	Pengawas Sekolah Madya	11	1.960
165.	Pengawas Sekolah Muda	9	1.385
166.	Pengawas Sekolah Pertama	8	1.310
167.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11	1.960
168.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	10	1.695
169.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	1.310
170.	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	11	1.930
171.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	9	1.385
172.	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	8	1.310
173.	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1.260
174.	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	1.035
175.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	770
176.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya	11	1.930
177.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	9	1.355
178.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	8	1.295
179.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	8	1.245
180.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan	7	1.020
181.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana	6	755
182.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	11	1.930
183.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	9	1.355
184.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	8	1.295
185.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8	1.245



No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
186.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan	7	1.020
187.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	6	755
188.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	5	555
189.	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	11	1.930
190.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	9	1.355
191.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	1.280
192.	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	8	1.230
193.	Penggerak Swadaya Masyarakat Mahir	7	1.005
194.	Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	6	805
195.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	5	555
196.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1.260
197.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1.035
198.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	770
199.	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	5	490
200.	Penguji Mutu Barang Pertama	8	1.295
201.	Penilik Madya	11	1.930
202.	Penilik Muda	9	1.355
203.	Penilik Pertama	8	1.280
204.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.030
205.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
206.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
207.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.260
208.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
209.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770
210.	Penyuluh Pajak Mahir	7	1.005
211.	Penyuluh Pajak Terampil	6	740
212.	Penyuluh Perikanan Pertama	8	1.310
213.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	11	1.930
214.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	1.355
215.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1.310
216.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8	1.260
217.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan	7	1.035
218.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana	6	770
219.	Penyuluh Pertanian Utama	13	2.685
220.	Penyuluh Pertanian Madya	11	2.030
221.	Penyuluh Pertanian Muda	9	1.385
222.	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.310
223.	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.260
224.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.035
225.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770
226.	Penyuluh Pertanian Pemula	5	570
227.	Penyuluh Sosial Madya	11	2.030
228.	Penyuluh Sosial Muda	9	1.385
229.	Penyuluh Sosial Pertama	8	1.310
230.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13	2.485
231.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11	1.930
232.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9	1.355
233.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8	1.280

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
234.	Perawat Gigi Penyelia	8	1.260
235.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
236.	Perawat Gigi Pelaksana	6	770
237.	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	520
238.	Perawat Madya	11	1.960
239.	Perawat Muda	9	1.385
240.	Perawat Pertama	8	1.310
241.	Perawat Penyelia	8	1.260
242.	Perawat Mahir	7	1.035
243.	Perawat Terampil	6	770
244.	Perawat Pemula	5	520
245.	Perekam Medis Pertama	8	1.260
246.	Perekam Medis Penyelia	8	1.260
247.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
248.	Perekam Medis Pelaksana	6	770
249.	Perekayasa Madya	11	1.930
250.	Perekayasa Muda	9	1.355
251.	Perekayasa Pertama	8	1.280
252.	Perencana Madya	11	1.930
253.	Perencana Muda	9	1.355
254.	Perencana Pertama	8	1.280
255.	Polisi Pamong Praja Madya	11	1.975
256.	Polisi Pamong Praja Muda	9	1.400
257.	Polisi Pamong Praja Pertama	8	1.325
258.	Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1.275
259.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1.050
260.	Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	755
261.	Polisi Pamong Praja Pemula	5	490
262.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	1.930
263.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	1.355
264.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	1.280
265.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	1.230
266.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.005
267.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	740
268.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5	490
269.	Pranata Komputer Utama	13	2.485
270.	Pranata Komputer Madya	11	1.930
271.	Pranata Komputer Muda	9	1.355
272.	Pranata Komputer Pertama	8	1.280
273.	Pranata Komputer Penyelia	8	1.230
274.	Pranata Komputer Mahir	7	1.005
275.	Pranata Komputer Terampil	6	740
276.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5	490
277.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	1.930
278.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.355
279.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.280
280.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.230
281.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
282.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
283.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	540

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
284.	Pustakawan Madya	11	1.930
285.	Pustakawan Muda	9	1.355
286.	Pustakawan Pertama	8	1.280
287.	Pustakawan Penyelia	8	1.230
288.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
289.	Pustakawan Pelaksana	6	740
290.	Radiografer Penyelia	8	1.260
291.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.035
292.	Radiografer Pelaksana	6	770
293.	Sandiman Madya	11	1.930
294.	Sandiman Muda	9	1.355
295.	Sandiman Pertama	8	1.280
296.	Sandiman Penyelia	8	1.230
297.	Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1.005
298.	Sandiman Pelaksana	6	740
299.	Sanitarian Madya	11	1.930
300.	Sanitarian Muda	9	1.370
301.	Sanitarian Pertama	8	1.295
302.	Sanitarian Penyelia	8	1.245
303.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020
304.	Sanitarian Pelaksana	6	755
305.	Sanitarian Pemula	5	505
306.	Statistisi Madya	11	1.930
307.	Statistisi Muda	9	1.355
308.	Statistisi Pertama	8	1.280
309.	Statistisi Penyelia	8	1.230
310.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7	1.005
311.	Statistisi Pelaksana	6	740
312.	Statistisi Pemula	5	490
313.	Teknik Pengairan Madya	11	1.975
314.	Teknik Pengairan Muda	9	1.400
315.	Teknik Pengairan Pertama	8	1.325
316.	Teknik Pengairan Penyelia	8	1.275
317.	Teknik Pengairan Mahir	7	1.050
318.	Teknik Pengairan Terampil	6	755
319.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama	13	2.530
320.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	11	1.975
321.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	9	1.400
322.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1.325
323.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia	8	1.275
324.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	7	1.050
325.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	6	755
326.	Teknisi Elektromedis Madya	11	1.930
327.	Teknisi Elektromedis Muda	9	1.355
328.	Teknisi Elektromedis Pertama	8	1.280
329.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1.260
330.	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
331.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
332.	Teknisi Jalan dan Jembatan Utama	13	2.530

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
333.	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	11	1.975
334.	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	9	1.400
335.	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	8	1.325
336.	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	1.275
337.	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	7	1.050
338.	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	6	775
339.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	1.230
340.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	1.005
341.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana	6	740
342.	Teknisi Transfusi Darah Pemula	5	490
343.	Terapis Wicara Penyelia	8	1.230
344.	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	7	1.005
345.	Terapis Wicara Pelaksana	6	740

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

HASIL EVALUASI JABATAN PELAKSANA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
1.	Analisis Pemerintahan Daerah	7	890
2.	Analisis Kerja Sama	7	890
3.	Analisis Bina Kehidupan Agama	7	890
4.	Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan	7	890
5.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7	890
6.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
7.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7	890
8.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	7	890
9.	Analisis Perekonomian	7	890
10.	Analisis Program Pembangunan	7	890
11.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	7	890
12.	Analisis Jabatan	7	890
13.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	890
14.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
15.	Analisis Pelayanan Publik	7	890
16.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	890
17.	Bendahara	7	890
18.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
19.	Analisis Humas	7	890
20.	Penata Acara	7	890
21.	Analisis Produk Hukum	7	890
22.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
23.	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	7	890
24.	Analisis Kursus dan Pelatihan	7	890
25.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	890
26.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	890
27.	Analisis Mutu Pendidikan	7	890
28.	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
29.	Pemeriksa Sanitasi	7	890
30.	Analisis Kesehatan	7	890
31.	Analisis Kesehatan Kerja	7	890
32.	Analisis Kimia	7	890
33.	Penata Keuangan	7	890
34.	Pemeriksa Kependudukan	7	890
35.	Pengawas Kependudukan	7	890
36.	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
37.	Analisis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	7	890
38.	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	7	890
39.	Analisis Data dan Informasi	7	890
40.	Penyusun Penyuluh Keluarga Berencana	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
41.	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
42.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
43.	Analisis Sarana Pelayanan	7	890
44.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
45.	Penyusun Bahan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
46.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	7	890
47.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
48.	Analisis Penyakit Menular	7	890
49.	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	890
50.	Analisis Obat dan Makanan	7	890
51.	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	890
52.	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890
53.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
54.	Pemeriksa Anggaran	7	890
55.	Pemeriksa laporan dan Transaksi Keuangan	7	890
56.	Analisis Jalan dan Jembatan	7	890
57.	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	890
58.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
59.	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	890
60.	Penelaah Bahan Jalan	7	890
61.	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	7	890
62.	Pengawas Irigasi	7	890
63.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	890
64.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
65.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
66.	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
67.	Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman	7	890
68.	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	890
69.	Analisis Tata Ruang	7	890
70.	Pengawas Tata Ruang	7	890
71.	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890
72.	Analisis Hukum Pertanahan	7	890
73.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890
74.	Pengawas Fisik Permukiman	7	890
75.	Analisis Pembangunan	7	890
76.	Penyusun Pemberian Bantuan Teknis	7	890
77.	Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	890
78.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	890
79.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
80.	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	890
81.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
82.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
83.	Analisis Perlindungan Perempuan	7	890
84.	Petugas Penindakan	7	890
85.	Penyidik	7	890
86.	Pengembang Program Penyuluhan	7	890



No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
87.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	7	890
88.	Analisis Kenelayanan	7	890
89.	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan	7	890
90.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	890
91.	Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir	7	890
92.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	890
93.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	890
94.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
95.	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	890
96.	Analisis Perikanan Budidaya	7	890
97.	Analisis Benih	7	890
98.	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	7	890
99.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
100.	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890
101.	Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	7	890
102.	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890
103.	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	890
104.	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
105.	Penyuluh Olahraga	7	890
106.	Analisis Keolahragaan	7	890
107.	Analisis Kepemudaan	7	890
108.	Penyuluh Kepemudaan	7	890
109.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890
110.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
111.	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	890
112.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
113.	Penyusun Rencana Permodalan	7	890
114.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	890
115.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	890
116.	Analisis Bidang Pengawasan	7	890
117.	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
118.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	890
119.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Produksi	7	890
120.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Produksi	7	890
121.	Pengawas Industri	7	890
122.	Analisis Industri	7	890
123.	Penelaah Data Sumber Benih	7	890
124.	Penata Dokumen Hasil Produksi	7	890
125.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	890
126.	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit	7	890
127.	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	7	890
128.	Pengawas Penyakit dan Pengendali Hewan	7	890
129.	Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat	7	890
130.	Pengawas Harga Pangan	7	890
131.	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	890
132.	Analisis Kapasitas Penyuluh	7	890

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
133.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
134.	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
135.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
136.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
137.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	890
138.	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	7	890
139.	Peneliti Laboratorium	7	890
140.	Instruktur Vokasional	7	890
141.	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan	7	890
142.	Analisis Tenaga Kerja	7	890
143.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	7	890
144.	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
145.	Penyuluh Koperasi	7	890
146.	Analisis Bimbingan Usaha	7	890
147.	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
148.	Analisis Objek Wisata	7	890
149.	Analisis Pariwisata	7	890
150.	Penyusun Promosi dan Kerja Sama	7	890
151.	Penyuluh Wisata	7	890
152.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	890
153.	Analisis Warisan Budaya	7	890
154.	Penyuluh Perpustakaan	7	890
155.	Penata Laporan Keuangan	7	890
156.	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890
157.	Penyelidik Geologi	7	890
158.	Penyuluh Bencana	7	890
159.	Konselor	7	890
160.	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890
161.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
162.	Analisis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	7	890
163.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	890
164.	Analisis Laporan Keuangan	7	890
165.	Analisis Pertanahan	7	890
166.	Analisis Perencanaan	7	890
167.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	7	890
168.	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	7	890
169.	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
170.	Analisis Program Diklat	7	890
171.	Analisis Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi	7	890
172.	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	890
173.	Analisis Politik Dalam Negeri	7	890
174.	Analisis Narkoba	7	890
175.	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	890
176.	Analisis Ketahanan Ekonomi	7	890
177.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	890
178.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6	690
179.	Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah	6	690
180.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
181.	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
182.	Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum	6	690
183.	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	6	690
184.	Pengolah Data Ekonomi	6	690
185.	Pengelola Data Statistik	6	690
186.	Pengolah Data	6	690
187.	Pengelola LPSE	6	690
188.	Pengelola Perangkat Kecamatan	6	690
189.	Pranata Barang dan Jasa	6	690
190.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690
191.	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
192.	Pengelola Akuntabilitas	6	690
193.	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	690
194.	Pengelola Kepegawaian	6	690
195.	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
196.	Pengelola Bangunan Gedung	6	690
197.	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690
198.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
199.	Pengelola Kendaraan	6	690
200.	Notulis Rapat	6	690
201.	Tenaga Peliputan	6	690
202.	Sekretaris	6	690
203.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	690
204.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
205.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	6	690
206.	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690
207.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
208.	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	690
209.	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	690
210.	Pengelola Program Gizi	6	690
211.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
212.	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	690
213.	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	690
214.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
215.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
216.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	690
217.	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690
218.	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	690
219.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
220.	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690
221.	Pengelola Kefarmasian	6	690
222.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690
223.	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690
224.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
225.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	6	690
226.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
227.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
	Keuangan		
228.	Pengelola Layanan Kehumasan	6	690
229.	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	690
230.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
231.	Pengelola Keperawatan	6	690
232.	Pengelola Poliklinik	6	690
233.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
234.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
235.	Pengelola Data Investigasi Internal	6	690
236.	Pengelola Kebidanan	6	690
237.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690
238.	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	690
239.	Pengelola Inspeksi Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
240.	Pengelola Keuangan	6	690
241.	Pengelola Tata Ruang	6	690
242.	Pengelola Irigasi	6	690
243.	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	690
244.	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air	6	690
245.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	690
246.	Pengelola Data Penatagunaan Tanah	6	690
247.	Koordinator Pergudangan	6	690
248.	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
249.	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	690
250.	Pranata Bencana	6	690
251.	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	690
252.	Pengelola Pembinaan Bantuan	6	690
253.	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	690
254.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	690
255.	Pengelola Data Komunitas Adat	6	690
256.	Pengelola Bimbingan Sosial	6	690
257.	Pengelola Data Bimbingan dan Konseling	6	690
258.	Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa	6	690
259.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	690
260.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690
261.	Pengelola Informasi dan Kerja Sama	6	690
262.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
263.	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	690
264.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
265.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
266.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	690
267.	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	690
268.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
269.	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690
270.	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	6	690
271.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	6	690
272.	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	690
273.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
274.	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	690
275.	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
276.	Pengelola Pengawasan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690
277.	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan	6	690
278.	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	690
279.	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	6	690
280.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690
281.	Pengelola Terminal	6	690
282.	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
283.	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	6	690
284.	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
285.	Pengelola Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
286.	Pengelola Data	6	690
287.	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690
288.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
289.	Jurnalis	6	690
290.	Pengelola Jaringan Telekomunikasi	6	690
291.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
292.	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	6	690
293.	Pengelola Situs/Web	6	690
294.	Pranata Alat Persandian	6	690
295.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	6	690
296.	Operator Transmisi Sandi	6	690
297.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	690
298.	Pengelola Kerjasama dan Investasi	6	690
299.	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	6	690
300.	Pengelola Dokumentasi	6	690
301.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
302.	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	690
303.	Pengelola Pasar	6	690
304.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
305.	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	6	690
306.	Pengelola Teknologi Perbenihan	6	690
307.	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690
308.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Saran dan Prasarana Pertanian	6	690
309.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
310.	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan	6	690
311.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	6	690
312.	Pengelola Data Pasca Panen	6	690
313.	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	690
314.	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	690
315.	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	690
316.	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	690

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
317.	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690
318.	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	690
319.	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	690
320.	Pengelola Program Penyuluhan	6	690
321.	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	690
322.	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
323.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
324.	Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	6	690
325.	Pranata Laporan Keuangan	6	690
326.	Pengelola Data Pelayanan	6	690
327.	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690
328.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
329.	Pengolah Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
330.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690
331.	Pengalih Media	6	690
332.	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690
333.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	690
334.	Pengelola Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan	6	690
335.	Pengelola Sampah	6	690
336.	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	690
337.	Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	6	690
338.	Pengelola Tenaga Kerja	6	690
339.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan	6	690
340.	Pranata Koperasi	6	690
341.	Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi	6	690
342.	Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	690
343.	Pengelola Objek Wisata	6	690
344.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
345.	Pengelola Data Warisan Budaya	6	690
346.	Pengelola Data Sejarah	6	690
347.	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690
348.	Pengelola Bahan Pustaka	6	690
349.	Pengelola Pustaka Elektronik	6	690
350.	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana	6	690
351.	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
352.	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	690
353.	Pengelola Penelitian	6	690
354.	Verifikator Anggaran	6	690
355.	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	6	690
356.	Pengolah Data dan Potensi Pajak	6	690
357.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690
358.	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690
359.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	690
360.	Verifikator Keuangan	6	690
361.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6	690



No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
362.	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
363.	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	6	690
364.	Pengelola Gaji	6	690
365.	Pengelola Anggaran	6	690
366.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	690
367.	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
368.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690
369.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690
370.	Pengelola Data Program Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non-Teknis	6	690
371.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	690
372.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
373.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
374.	Pengelola Kerja Sama	6	690
375.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
376.	Pengadministrasi Umum	5	490
377.	Pengadministrasi LPSE	5	490
378.	Pengadministrasi Hukum	5	490
379.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
380.	Petugas Protokol	5	490
381.	Pemelihara Kendaraan	5	490
382.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
383.	Pengadministrasi Rapat	5	490
384.	Pengadministrasi Risalah	5	490
385.	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	490
386.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
387.	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
388.	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	5	490
389.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
390.	Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar	5	490
391.	Pengadministrasi Pelatihan	5	490
392.	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	5	490
393.	Binatu Rumah Sakit	5	490
394.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
395.	Pemelihara Peralatan	5	490
396.	Teknisi Keciptakarya	5	490
397.	Teknisi Air	5	490
398.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
399.	Kartografer	5	490
400.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	490
401.	Penagih Retribusi	5	490
402.	Juru Survey Permukiman Perumahan	5	490
403.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	5	490
404.	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490
405.	Ajudan	5	490
406.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	490
407.	Teknisi Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
408.	Teknisi Konservasi	5	490

No.	Nama Jabatan	Kelas	Nilai Jabatan
409.	Pengadministrasi LLAJ	5	490
410.	Operator Terminal	5	490
411.	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5	490
412.	Juru Pungut Retribusi	5	490
413.	Pelatih Atlet Disable	5	490
414.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
415.	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
416.	Perawat Ternak	5	490
417.	Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	5	490
418.	Pengadministrasi Kependudukan	5	490
419.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	490
420.	Juru Informasi dan Komunikasi	5	490
421.	Juru Pungut Kebersihan	5	490
422.	Pengadministrasi Pajak	5	490
423.	Pemandu Wisata	5	490
424.	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	490
425.	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	490
426.	Pengawas Olahraga	5	490
427.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
428.	Teknisi Perikanan Budidaya	5	490
429.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5	490
430.	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490
431.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	490
432.	Pengadministrasi Anggaran	5	490
433.	Pengadministrasi Pertanahan	5	490
434.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
435.	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	490
436.	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	490
437.	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	490
438.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
439.	Pranata Taman	5	490
440.	Juru Rawat jenazah	5	490
441.	Pengemudi Ambulance	4	440
442.	Pengemudi	3	340
443.	Petugas Keamanan	3	340
444.	Penjaga Taman Makam Pahlawan	3	340
445.	Pramu Bakti	1	190
446.	Pramu Kebersihan	1	190
447.	Pramu Taman	1	190

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005